



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA,  
PARIWISATA, EKONOMI KREATIF, RISTEK DIKTI, DAN PERPUSNAS)**

---

Tahun Sidang	: 2016 - 2017.
Masa Persidangan ke-	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka.
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	: <b>1. Sekretaris Kemenpar RI.</b> <b>2. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan Kemenpar RI.</b> <b>3. Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Nusantara Kemenpar RI.</b>
Hari/Tanggal	: <b>Senin, 26 September 2016.</b>
Pukul	: <b>14.00 WIB s/d selesai.</b>
Tempat	: Griya Wisma DPR RI Kopo, Cisarua, Bogor Jawa Barat.
Pimpinan Rapat	: Teuku Riefky Harsya M.T./Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Sarilan Putri Khairunnisa, S.Sos/Kabagset Komisi X DPR RI.
Acara	: <b>Pendalaman RKA K/L TA 2017.</b>
Hadir	: 31 orang dari 51 Anggota Komisi X DPR RI.
Hadir Pemerintah	: 1. Sekretaris Kemenpar RI beserta jajarannya. 2. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan Kemenpar RI beserta jajarannya. 3. Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Nusantara Kemenpar RI beserta jajarannya.

**I. PENDAHULUAN.**

Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.25 WIB oleh Teuku Riefky Harsya, M.T./Ketua Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan dari Sekretaris Kemenpar RI, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataaan Kemenpar RI, dan Deputi Bidang Pengembangan Pariwisata Nusantara Kemenpar RI, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

### A. SEKRETARIAT KEMENPAR RI

1. Pagu anggaran (sementara) Sekretariat Kemenpar RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 319,588 miliar mengalami penurunan sebesar Rp 36,099 miliar atau 10,15 persen terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 355,687 miliar.
2. Komisi X DPR RI mendorong Sekretariat Kemenpar RI untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan dan regulasi kepariwisataan dalam rangka meningkatkan pemahaman sadar wisata bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat.

### B. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KEMENPAR RI

1. Pagu anggaran (sementara) Deputi Bidang Kelembagaan Kepariwisata Kementerian RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 764 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp 320,182 miliar atau 72,14 persen terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 443,818 miliar.
2. Terhadap pengembangan kelembagaan kepariwisataan, Komisi X DPR RI menilai bahwa:
  - a. Penyiapan dan kesiapan SDM kepariwisataan perlu dikelola lebih baik karena jumlah-kualifikasi-dan kompetensi SDM yang tersedia belum memenuhi ratio ideal dengan jumlah wisatawan, untuk itu perlu konsep peta jalan SDM kepariwisataan yang komprehensif.
  - b. Studi kelayakan pendirian pendidikan tinggi pariwisata di Poltekpar Palembang belum diikuti dengan sinkronisasi dan koordinasi dengan K/L terkait, serta belum sesuai dengan rencana wilayah pengembangan destinasi wisata prioritas dan utama yang telah dicanangkan oleh Kemenpar RI.
  - c. Usulan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk program pengembangan pendidikan tinggi pariwisata di Poltekpar Palembang dan Lombok diperlukan kajian lebih lanjut dari sisi program prioritas nasional dalam penyediaan SDM kepariwisataan seperti sertifikasi, kualifikasi, dan kompetensi yang berstandar internasional.

### C. DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA KEMENPAR RI

1. Pagu anggaran (sementara) Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Nusantara Kementerian RI RAPBN TA 2017 sebesar Rp 421,186 miliar mengalami penurunan Rp 508,642 miliar atau 54,70 persen terhadap pagu anggaran (sementara) RAPBN TA 2016 sebesar Rp 929,828 miliar.
2. Komisi X DPR RI menilai bahwa strategi pemasaran melalui **DOT**, strategi promosi melalui **BAS**, strategi media melalui **POSE**, dan strategi rentang waktu promosi melalui **POP** harus terus dikaji dan evaluasi secara berkala agar strategi yang ditetapkan tersebut sesuai dengan perencanaan dan target.

**D. Lain-lain**

1. Komisi X DPR RI mendesak Sesmen, Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, dan Deputi Bidang Pengembangan Kepariwisata Nusantara Kemenpar RI untuk merasionalisasi usulan program/kegiatan dan anggarannya dengan memperhatikan kesinambungan/ keberlanjutan program, tren kepariwisataan, penyiapan dan kesiapan SDM, serta target Pemerintah.
2. Hasil rasionalisasi tersebut akan digunakan sebagai bahan Raker Komisi X DPR RI dengan Menpar RI yang dijadwalkan pada tanggal 10 Oktober 2016 (tentatif).

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul **16.30** WIB

**KETUA RAPAT,**



**TEUKU RIEFKY HARSYA, M.T.**